POLITIK TATA KELOLA PROGRAM PENGOLAHAN SAMPAH ENERGI LISTRIK (PSEL) DI KOTA MAKASSAR



SABRINA AINUN SORRAYA ABRAR E041201047



DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN PENGAJUAN

POLITIK TATA KELOLA PROGRAM PENGOLAHAN SAMPAH ENERGI LISTRIK (PSEL) DI KOTA MAKASSAR

Yang Diajukan Oleh:

Sabrina Ainun Sorraya Abrar E041201047

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Ilmu Politik

Pada

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

POLITIK TATA KELOLA PROGRAM PENGOLAHAN SAMPAH ENERGI LISTRIK (PSEL) DI KOTA MAKASSAR

SABRINA AINUN SORRAYA ABRAR E041201047

Skripsi,

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi dalam rangka penyelesaian Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan Pada 19 April 2024

Telah Disetujui Oleh:

Penbimbing Utama

Dr. Sakinal Nadir, S.IP., M.Si. NIP. 19791218 200812 2 002

STATE OF STAS

Pembimbing Pendamping

Maryanto, S.IP. M.A. NIP. 19861008 201903 1 009

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik

Dr. Sakinah Nadir, S.W., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Politik Tata Kelola Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) Di Kota Makassar" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si sebagai pembimbing utama dan Haryanto, S.IP., M.A sebagai pembimbing pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 16 April 2024

SABRINA AINUN SORRAYA ABRAR E041201047

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya kepada penulis, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. proses penelitian ini telah menjadi sebuah perjalanan yang memperkaya pengalaman dan pengetahuan penulis.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak yang senantiasa memberikan dorongan, arahan, serta masukan yang berharga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada kedua orang tua tercinta **Abd. Abrar Sonda, S.E** dan **Syamsinar** yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan semangat dalam setiap langkah akademik ini, didikanmu yang tegas dan penuh makna mewarnai perjalanan hidup penulis hingga kini dan nanti.

Kepada yang terkasih **Muntaz Sonda, S.E** yang menjadi saksi hidup penulis dikala sedih dan bahagia, terima kasih telah hadir disaat penulis membutuhkan pendapat dan saran dalam mengambil keputusan akademik dan non-akademik, menjadi teman cerita bagi penulis, dan disetiap pertolongan yang berharga. Tetaplah bersama penulis hingga akhirnya mampu membalas disetiap kebaikan yang diberikan oleh penulis.

Terima kasih kepada saudara tercinta **Abdul Maalikul** dan saudari **Arsanda Abranegara** telah menjadi alasan untuk penulis terus berproses menuju kesuksesan dalam versi terbaik diri penulis, walaupun tidak banyak waktu yang kita habiskan bersama tetapi yakin dan percaya doa terbaik senantiasa mengiringi langkah-langkah kalian. Semangat mewujudkan cita-cita dan impian serta menjadi anak yang berbakti bagi kedua orangtua.

Terima kasih kepada Dosen Pembimbing Utama terdahulu Bapak (Alm)Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga serta banyak membantu penulis dibidang akademik dan non-akademik. Kepada Pembimbing Utama Skripsi saya hingga akhir Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si. Kepada Dosen Pembimbing Pendamping hingga akhir penulisan skripsi ini sekaligus Penasehat Akademik penulis Haryanto, S.IP., M.A. terima

kasih atas pendapat dan saran yang diberikan kepada penulis dalam mengambil keputusan perihal akademik, atas pencapaian prestasi yang diraih oleh penulis selama menjadi Mahasiswa tak lepas dari bimbingan dan arahan beliau. Doa-doa baik yang senantiasa penulis panjatkan atas kesehatan dan kebahagiaan dosen pembimbing penulis.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada :

- Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 2018-2022 Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes., CWM. Telah memberikan kesempatan kepada penulis diterima sebagai Mahasiswa Universitas Hasanuddin melalui program jalur Ketua OSIS dan membuka ruang pelatihan kepemimpinan.
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si., sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- 3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si., dan pendahulunya Bapak Dr. Hasrullah, M.A, terima kasih telah memberikan ruang untuk berproses sebagai mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan prestasi penulis. Beserta segenap jajaran staf akademik, Kasubag Bapak Sutamin, S.sos., M.Tr,A.P, Ibu Ijah, Bapak Herman, Bapak Jaya yang telah mempermudah penulis dalam urusan administratif selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak Dr. M. Iqbal Sultan, M. Si. beserta jajaran staf.

- 5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak **Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si.** beserta jajaran staf.
- Ketua Departemen Ilmu Politik, Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si. Dan Bapak (Alm) Drs. Andi Yakub, M. Si., Ph. D. Ketua Departemen Ilmu Politik terdahulu yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
- 7. Bapak Ibu Dosen lainnya di Departemen Ilmu Politik: Bapak Prof. Dr. Phill. Sukri., S.IP., M.Si, Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si., (Alm.) Bapak Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag., Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Bapak Haryanto, S.IP., M.A, Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A., Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A., dan ibu Endang Sari, S.IP., M.Si yang telah mendukung dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
- 8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak Hamzah, Syamsuddin, S.T., dan Ibu Musriati S.E., yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan dan telah menjadi teman cerita bagi penulis di departemen.
- 9. Kak **Rizal Pauzi**, Kak **Adnan Kasogi**, Kak **Adnan Nasution**, Kak **Jayana**, Kak **Aswin**, yang telah membantu dan memberikan saran kepada penulis selama kegiatan kemahasiswaan.
- 10. Kepada seluruh informan khususnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Makassar Bapak Ferdi Mochtar, Wakil Ketua DPRD kota Makassar Bapak Adi Rasyid Ali, Perwakilan Masyarakat TPA Antang Bapak Makmur, Perwakilan Masyarakat Tamalanrea Bapak Amrun, Ahli Tata Ruang Bapak Irwan, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan kak Amien, dan Perwakilan Pemenang Tender PSEL kota Makassar Mr. Huang Chang Chun, telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk melakukan wawancara terkait datadata yang diperlukan untuk penelitian.
- 11. Seluruh keluarga besar di Jeneponto Sonda Radja Karaeng Tayang dan Hj. Sitti Aisyah Makka Dg. Pa'ja terima kasih atas perhatian dan dorongan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menuju kesuksesan. Khususnya sepupu-sepupu

- Rezkyanti Ismail, S.Pd., Nur Annisa Halil Sonda, Fahan Abduh, Muh Taufik Nur Hidayat, S.E. yang menjadi penyemangat dan tempat bertukar keluh kesah atas ketidakpastian takdir masa depan, tapi yakin dan percaya itu sudah diatur semua sama Allha SWT, kita hanya bisa berusaha dan berdoa yang terbaik, panjang umur perjuangan, sehat dan sukses selalu kalian.
- 12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Sekretariat Jenderal DPR RI terima kasih telah memberikan ruang dan kesempatan bagi penulis untuk magang melalui program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka untuk mengembangkan potensi dan keterampilan diri serta relasi kepada penulis.
- 13. Kepala Sekretariat Komisi III DPR RI Ibu Novianti, S.E., dan jajaran mentor Bapak Rion, Ibu Sagung, Bapak Monang, Ibu Rara, Bapak Victor, Bapak Suaib, serta seluruh Staf dan Tenaga Ahli di Komisi III DPR RI terima kasih telah memberikan banyak pengetahuan dan pembelajaran dibidang Hukum, HAM, dan Keamanan serta Politik selama proses magang berlangsung.
- 14. Kepada Bapak dan Ibu dewan Komisi III DPR RI yang senantiasa membuka ruang untuk berdiskusi kepada penulis sehingga mendapatkan wawasan baru, terkhusus kepada Bapak dewan Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. H. Adang Daradjatun beserta jajaran Tenaga Ahli dan Relawan terima kasih telah memberi kesempatan bagi penulis untuk turut mengamati dan terlibat langsung dalam praktik politik dengan agenda Reses Anggota Dewan Komisi III DPR RI dan Ibu Dewan Dyah Roro Esti W.P., B.A., M.Sc. yang menjadi panutan penulis dalam berproses meningkatkan potensi diri dan memotivasi untuk fokus mengejar cita-cita dan impian penulis, semoga dalam keadaan sehat dan sukses selalu, insyallah dipertemukan kembali dengan Bapak dan Ibu dewan dalam versi terbaik diri penulis.
- 15. Teman-teman Kelompok Adam Malik Unit Kerja Komisi III DPR RI yaitu, Sri selaku Sekdiv, Alef, Stephanie, Aya, Abid, Syahril, Yosua, Fajhri, dan Austin, serta teman ruangan sebelah Edo, Rachmi, Pandya, Lizy, Wahyu sebagai tempat bertukar cerita dan pengalaman, memberikan banyak bantuan, kerjasama, selama berlangsungnya program magang ini.

- 16. Teman-teman Angkatan Nava Panca MDRR DPR RI 2023, BPH, Fraksi Sungai Batanghari dan Pimpinan DPR RI Sidang Paripurna yang senantiasa menjadi kawan berdiskusi, berdinamika, dan saling support dalam proses simulasi persidangan. Penulis belajar banyak dari berbagai macam karakter dan perspektif baru baik itu tentang kehidupan kampus, fenomena sosial politik, serta canda tawa yang dirajut bersama
- 17. Kepada **Himapol FISIP Unhas** sebagai ruang untuk penulis menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga yang tidak diperoleh dalam ruang kelas perkuliahan. Penulis jatuh cinta terhadap nilai-nilai organisasi yang dianut dan bersyukur bisa tergabung dalam bingkai hitam putih bersama orang-orang hebat dengan potensi diri yang dimilikinya.
- 18. Kepada FORKOM JAKETOS UNHAS yang telah menjadi ruang mengasah skill kepemimpinan dan manajemen organisasi, bertemu dengan para pemimpin di masanya sebagai ketua OSIS tentu banyak belajar dari orang-orang yang tergabung dalam organisasi ini. Terkhusus kepada Amrun, Indar, Agung, Andini, Sabila, Coko, Fadhilah yang telah membersamai disela-sela sibuknya urusan organisasi dan saling support, tempat berbagi keluh kesah dari lelahnya berorganisasi, dibalik hebatnya mereka dalam manajemen organisasi dan problem solving akan kalah dengan menentukan tempat makan yang menghabiskan waktu cukup lama, setiap moment yang rajut bersama akan menjadi cerita bagi kita untuk masa yang akan datang.
- 19. Seluruh teman-teman PAKARENA 12 UKM SENI TARI UNHAS dan seperjuangan dikepengurusan, terima kasih telah membersamai atas setiap dinamika yang ada kepada Dewi, Afika, Ismi, Eki, Fani, Kak Lulu, Winda, Wiranti, Gina, Ariyanti, Ayu, Ihda, Kak Irfan, Kak Amri, Kak Fira, Kak Fausta, Kak Amar, Widy, Wilda, Indah, Kak Dirna, Kak Agung, Kak Egi, Kak Aliftsa, terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada penulis sebagai pengurus inti dari bagian Departemen Pelatihan dan Kaderisasi.
- 20. Kepada UKM PRISMA FISIP UNHAS yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan minat seputar penalaran dan penulisan ilmiah, banyak belajar dari orang-orang hebat yang tergabung dalam ruang ini sehingga penulis dapat merasakan manfaatnya selama perkuliahan. Khususnya pada kepengurusan Divisi Riset dan Penalaran, penulis dapat

- meningkatkan *softskill* dalam bidang ini bersama orang-orang yang tergabung dalam organisasi ini.
- 21. Kepada **Himapol Indonesia**, khususnya **Korwil V** yang telah menjadi wadah untuk menjalin relasi di tingkat nasional dan saling belajar mengenai sosial, ekonomi, dan politik.
- 22. Seluruh teman-teman **Ilmu Politik 2020** Terkhusus **Etsuko**, **Novia**, **Dilla**, **Ratih**, **Firjah**, **Fia**, **Cila** yang telah menyambut hangat penulis dikala *hectic*-nya perkuliahan.
- 23. Seluruh teman-teman **DINAMIS 2020** yang menjadi rumah kedua bagi penulis, terima kasih telah menjadi seperti saudara dibangku perkuliahan, merajut kebersamaan dengan beragam cerita yang berwarna, terima kasih telah memberi bantuan kepada penulis dari menyandang status Mahasiswa Baru hingga akhir ini. Terima kasih saya ucapkan dengan tulus kepada teman-teman yang senantiasa dan bersedia bergabung dalam kepengurusan yang penulis pimpin bersama Jefri, kepada Tasya, Zam, Fito, Danni, Sessung, Lucky, Gope, Fira, Tenri, Triza, Ade, Faran. Kardy, Rika, Septi, Sasa, Lela, Lidia, Marlina, Dzakir, Ucup, Abim, Masita, Marlina, Alda, Umi, Mail, Opa, Haya, Santi, Kiki, Lala, Nunu, Eky, Raihan, Fani, Burhan semangat kejar gelar S.IP nya, penulis akan selalu menanti ajakan nongkrong dari kalian. Hal-hal baik senantiasa hadir disetiap langkah perjuangan kalian, sehat selalu dan sampai jumpa dilain waktu.
- 24. Kepada tim sukses sewaktu penulis mengikuti kontestasi pemilihan Ketua Umum Himapol FISIP Unhas periode 2022-2023, terima kasih penulis ucapkan dengan tulis kepada **Kak Ibnu, Kak Rista, Kak Anres, Kak Arifin, Sessung, Gope, Lela**, dan orang-orang yang terlibat juga menyaksikan betapa gelisah dan paniknya penulis dalam menjalani proses pemilihan umum ini, terima kasih telah mempercayai penulis dan memotivasi penulis untuk optimis akan segala hal.
- 25. Kepada tim PKM-RSH Bissu, yang tergabung didalamnya Ibu Faya, Zam, Tasya, Danni, Gope, dan kontribusi Dzakir sebagai editor poster dalam lomba ini, banyak lika-liku yang dihadapi mengingat tim ini dibentuk dadakan dan alhamdulillah lolos sampai tahap pendanaan tingkat nasional, terima kasih telah membersamai penulis dalam proses lomba ini, banyak manfaat dan pengalaman yang diperoleh selama lomba ini berlangsung.

- 26. Kawan seperjuangan ambis bidang akademik Kak Erik, Kak Miftah, Kak Rista, Lutfi, dan Santi, yang telah direpotkan oleh penulis dari berbagai macam lomba di ikuti akhirnya berhasil tembus juara tingkat nasional di Universitas Brawijaya.
- 27. *Ex-officio* Kema FISIP Unhas terhimpun para petinggi lembaga FISIP Unhas Dadang, Rafli, Tiwi, Pemmisan, Alfreda, dan Ifkar, terima kasih telah menjadi tempat untuk bertukar cerita dan sebagai sumber belajar mengenai organisasi, bersyukur bisa kenal dan bekerjasama dengan kalian. Penulis berharap kalian dapat terus memaknai disetiap proses perjalanan hidup kalian, semangat mengejar gelar Sarjana dan Karir.
- 28. Kepada OSIS Eti, Yana, Yani, Wanda, Farah, Iwan, Priska, Tiara, Oscar, Sagita, Alifia, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi bagi penulis disaat resah dan gelisah akan suatu hal, mereka adalah tempat bercerita yang mengerti kondisi penulis, terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kalian atas segala kebaikan. Sehat dan jaga selalu pertemanan ini.
- 29. Sahabat seperjuangan **Ayundhasari**, **Natasya Amelia**, **Putri Wulan Suci** yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta inspirasi dalam perjalanan hidup ini, selamat berproses menuju kesuksesan dan semoga persahabatan yang terjalin sudah lebih dari 1 dekade ini dapat terus berlanjut.
- 30. Seluruh peserta Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Menengah (TM) kota Makassar dan Tingkat Lanjut (TL) se-Sulawesi telah mengukir kenangan yang berharga dalam pelatihan ini, penulis bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang hebat seperti kalian yang memiliki potensi diri yang luar biasa, semoga nanti kita masih dipertemukan dilain waktu.
- 31. Kawan-kawan **SOSPOL 20** yang menjadi tempat bagi penulis dalam berkegiatan di lembaga mahasiswa dengan riang gembira.
- 32. Kepada **Taylor Swift** yang menjadi penyemangat melalui lagulagunya dalam album *Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore, Midnights, The Tortured Poets Departement* sejak penulis mengenyam pendidikan di bangku SD hingga sekarang.

- 33. Teruntuk orang-orang yang pernah singgah tapi tak sungguh, terima kasih telah hadir dalam perjalanan hidup penulis, senang bertemu dan banyak belajar dari kalian, cerita dan kenangan yang dirajut bersama akan menjadi kisah tersendiri bagi penulis.
- 34. Terkhusus penulis sendiri yang telah berjuang bersungguhsungguh dalam perjalanan hidup ini khususnya pada sesi tingkat
 perguruan tinggi. Waktu dan tenaga yang dikeluarkan dalam
 bidang akademik, organisasi dan kegiatan lainnya demi
 pengembangan diri, karir, dan relasi akan menjadi batu loncatan
 bagi penulis dalam menghadapi sesi kehidupan selanjutnya,
 sehat dan sukses selalu, yakin dan percaya Allah SWT akan
 selalu hadir dengan limpahan berkah, rahmat, nikmat, dan rejeki
 disetiap langkah penulis, ingatlah bahwa sebaik-baiknya
 rencana disiapkan tentu rencana Allah SWT jauh lebih baik. Last
 but not least, terus bersyukur dan wujudkan setiap wishlist yang
 didambakan. Have courage and be kind.

Penul

Sabrina Ainun Sorraya Abrar

ABSTRAK

Sabrina Ainun Sorraya Abrar. NIM E041201047. Politik Tata Kelola Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di kota Makassar. Dibimbing oleh Sakinah Nadir dan Haryanto.

Pengolahan sampah sebagai sumber energi listrik merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, berdasarkan kebijakan tersebut Kota Makassar terpilih sebagai kota darurat sampah. Dalam proses implementasinya melibatkan banyak aktor dan kepentingan sehingga dihadapkan berbagai macam kendala. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena tentang interaksi aktor kebijakan dalam politik tata kelola program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar dan melihat potensi dampak yang diperoleh terhadap adanya program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dari Paul A. Sabatier untuk menganalisis interaksi aktor kebijakan dalam program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif yang mengacu pada metode penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang memiliki peran penting dalam rencana diterapkannya program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar, dan didapatkan dalam studi kepustakaan sebagai data sekunder

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam kebijakan PSEL terbagi menjadi dua, yaitu aktor negara meliputi Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar yang memiliki keputusan untuk melaksanakan program Pengolahan Sampah Engergi Listrik (PSEL) di Kota Makassar. Aktor non-negara terdiri dari sektor privat yaitu Pihak Tender Pemenang dan civil society meliputi Masyarakat Terdampak di Tamangapa dan di Tamalanrea. Aktor kebijakan tersebut saling berintekasi satu sama lain dan berusaha kepentingan yang berbeda. Sehinaga melibatkan membuat ketergantungan terhadap aktor sektor *private*. Dari interaksi tersebut terbentuk koalisi pro dan koalisi kontra yang menghasilkan potensi dampak terhadap masing-masing aktor kebijakan diantaranya meliputi konflik antara eksekutif dan legislatif, konflik penentuan lahan pembangunan Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar, dan perencanaan kebijakan yang berkelanjutan.

Kata kunci : interaksi aktor, kebijakan publik, PSEL, kerangka koalisi advokasi

ABSTRACT

Sabrina Ainun Sorraya Abrar. NIM E041201047. Policy Governance of Waste-To-Energy (WTE) Program in Makassar City. Supervised Sakinah Nadir and Haryanto.

Processing waste as a source of electrical energy is one of the National Strategic Projects as stipulated in Presidential Regulation Number 35 of 2018, based on this policy Makassar City was chosen as a waste emergency city. In the implementation process, it involves many actors and interests so that various obstacles are faced. Thus, this study aims to describe the phenomenon of the interaction of policy actors in the political governance of the Waste Management of Electrical Energy (PSEL) program in Makassar City and see the potential impact obtained by the Waste Management of Electrical Energy (PSEL) program in Makassar City.

This research uses the Advocacy Coalition Framework (ACF) theory from Paul A. Sabatier to analyze the interaction of policy actors in the Waste Management of Electric Energy (PSEL) program in Makassar City using a qualitative research type that refers to descriptive analysis research methods. The data collection technique used is in-depth interviews with several informants who have an important role in the plan to implement the Waste Energy Electricity Processing (PSEL) program in Makassar City, and obtained in the literature study as secondary data.

The results showed that the actors involved in the PSEL policy were divided into two, namely state actors including the Makassar City Government and the Makassar City DPRD who had the decision to implement the Waste Processing Electricity (PSEL) program in Makassar City. Non-state actors consist of the private sector, namely the Winning Tender Party and civil society including the Affected Communities in Tamangapa and in Tamalanrea. These policy actors interact with each other and try to involve different interests. Thus creating dependence on private sector actors. From these interactions, a coalition of pros and a coalition of cons is formed which results in potential impacts on each policy actor including conflicts between the executive and legislative branches, conflicts over the determination of land for the construction of Waste Processing for Electrical Energy (PSEL) in Makassar City, and sustainable policy planning.

Keywords: actor interactions, public policy, waste to energy, advocacy coalition framework

DAFTAR ISI

	MAN PENGAJUAN	
	MAN PENGESAHAN	
	ATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPT	
	N TERIMA KASIH	
	AK	
	ACT	
	R ISI	
	R GAMBAR	
	R TABEL	
	R LAMPIRAN	
	PENDAHULUAN	
	Latar Belakang	
	Rumusan Masalah	
1.3.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.	Penelitian Terdahulu	
2.2.	Interaksi antar Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik.	
2.3.	Konsep Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL)	
	Makassar	
2.4.	Kerangka Berpikir	
	METODE PENELITIAN	
3.1.	Tipe dan Jenis Penelitian	
3.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian	
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian	
3.4.	Teknik dan Pengumpulan Data Penelitian	
3.5.	Informan Penelitian	
3.6.	Teknik Analisis Data Penelitian	
3.7.	Skema Penelitian	
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
4.1.	Interaksi aktor kebijakan dalam program Pengolahan	
4.2.	Energi Listrik (PSEL) di kota Makassar	
4.3.	Pembentukan Koalisi	
4.3. 4.4.	Potensi Dampak Interaksi Aktor Kebijakan dalam	
4.4.	Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makas	
DAD IX	KESIMPULAN	
	R PUSTAKA	
	DAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Makassar	.28
Gambar 2. Lokasi TPA Tamangapa	.30
Gambar 3. Lokasi Pembangunan Proyek PSEL	.31

D_{I}			. —	•	_	
	\ FT	Λ L	, .	Λ		

Tabel 1. Daftar	Informan	23	3
i aboi ii bailai	minominan		•

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi 1. Wawancara Bersama Ferdi Mochtar, Ph.D. (Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar) Pada Tanggal 04 Maret 202495
Dokumentasi 2. Wawancara Bersama Adi Rasyid Ali, S.E., M.M.
(Wakil Ketua DPRD kota Makassar) Pada Tanggal 06 Maret 202495
Dokumentasi 3. Wawancara Bersama Huang Chang Chun
(Investment Manager of Shanghai SUS Environment Co., Ltd) Pada
Tanggal 14 Maret 202496
Dokumentasi 4. Wawancara Bersama Makmur, S.Sos. (Masyarakat
di TPA Antang Kec. Manggala) Pada Tanggal 29 Februari 202496
Dokumentasi 5. Wawancara Bersama Muhammad Al Amien (Direktur
Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan) Pada Tanggal 27
Februari 202497
Dokumentasi 6. Wawancara Bersama Amran (Masyarakat di Kec.
Tamalanrea) Pada Tanggal 07 Maret 202497
Dokumentasi 7. Wawancara Bersama Irwan Anwar Said, S.Sos.,
M.Si. (Akademisi/Ahli Tata Kota) Pada Tanggal 23 Februari 2024 98

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan perkotaan di Indonesia telah mengalami puncak pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. Fenomena urbanisasi yang pesat, pertumbuhan populasi, dan perkembangan ekonomi merupakan pendorong utama transformasi di wilayah perkotaan Indonesia, yang pada gilirannya berdampak pada produksi dan manajemen sampah yang tidak terkendali. Besarnya jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang layak telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan di perkotaan (Gunawan et al., 2015). Menghadapi tantangan tersebut, maka hadirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menjabarkan upaya pemerintah dalam menangani masalah sampah. Pada pasal 1 ayat 5 dalam undang-undang tersebut mengartikan pengelolaan sampah sebagai kegiatan menyeluruh, teratur, dan berkelanjutan melalui pengolahan sampah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008). Instrumen hukum ini menjadi dasar dalam pengelolaan sampah sebab problematika persampahan di Indonesia telah meniadi isu nasional.

Pengelolaan sampah yang buruk berdampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup. Tumpukan sampah yang berlebihan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ini dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air serta meningkatkan risiko penularan penyakit. Selain itu, model pengelolaan sampah berbasis pembuangan akhir tidak memanfaatkan potensi sumber daya sampah yang dapat didaur ulang, termasuk potensi energi yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara telah sepatutnya dapat membuat kebijakan secara demokratis (Nugroho, 2018). Menurut Miriam Budiardjo dalam membuat kebijakan tentunya perlu mengambil keputusan politik untuk memenuhi hak dan kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana dipahami bahwa pengambilan keputusan ini sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakankebijakan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentuk kebijakan umum atau kebijakan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih beberapa alternatif yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah (Budiardjo,2007:19).

Kebijakan pemerintah yang menjadi fokus utama dalam pengolahan sampah di Indonesia yakni hadirnya program pengolahan sampah berbasis energi listrik (PSEL) menjadi alternatif yang menjanjikan. PSEL mengintegrasikan teknologi pembangkit listrik dari sampah dengan pengelolaan yang efisien. Proses ini tidak hanya dapat mengurangi masalah sampah, tetapi juga memanfaatkan potensi sumber daya sampah menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi kota. Melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) terus berupaya memanfaatkan sampah menjadi energi, yang dikenal dengan istilah waste to energy, demi mewujudkan pengelolaan lingkungan dan kesehatan yang lebih baik, dengan energi sebagai nilai tambah dari proses tersebut (EBTKE, 2022).

Pemanfaatan sampah sebagai energi merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 ("Perpres Nomor 35 Tahun 2018") tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dan Pengaturan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi landasan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia salah satunya ialah Pengelolaan Sampah Energi Listrik (PSEL) yang menjadi payung hukum, sekaligus juga memerintahkan percepatan implementasi PSEL di 12 kota utama yang mengalami kedaruratan sampah (Hadiyono, 2020: 23). PSEL itu berlokasi di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang dan Kota Manado.

Kota Makassar terpilih sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam pelaksanaan program pengolahan sampah energi listrik (PSEL) yang telah melalui pada tahapan masa sanggah pemenang tender melalui mekanisme KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur) kemudian diumumkan oleh panitia lelang berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 3361/188.4.45/TAHUN 2023 Tentang Penetapan Pemenang Tender Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Kota Makassar, yang terdiri dari Konsorsium Pemenang yakni SUS Indonesia Holding Limited, Shanghai SUS Environment Co., Ltd., dan PT Grand Puri Indonesia kemudian Pemenang Cadangan 1 yakni PT Tian Ying Indonesia, PT. China Communication Construction Engineering Indonesia, dan PT. Kenanga Jaya. Dan Pemenang Cadangan 2 yakni Hangzhou Jinjiang Environment Co., Ltd dan PT. Cahaya Satria Energi ("Pengumuman Pemenang Tender PSEL Kota Makassar", 2023). Pemenang tender tersebut tentunya wajib memenuhi lima kriteria yakni pengelolaan lingkungan, pemilihan teknologi, sosial kemasyarakatan, lahan dan regulasi, dan kelayakan finansial untuk pembangunan PSEL. Dengan diumumkannya pemenang lelang ini maka proses implementasi program pengolahan sampah energi listrik di kota Makassar akan menuju tahap Ground Breaking (Siti Aminah, 2024).

Pembangunan pengolahan sampah energi listrik (PSEL) ini dalam proses implementasinya sebagai sebuah industriliasasi listrik berbahan bakar sampah diharapkan dapat meminimalisir permasalahan sampah di Kota Makassar, pada realitanya justru mendapatkan pertentangan dan perbedaan pendapat masyarakat. Tidak hanya dari masyarakat Kecamatan Tamangapa dan masyarakat Kecamatan Tamalanrea, pertentangan tersebut turut melibatkan beberapa pihak lainnya seperti DPRD kota Makassar, WALHI Sulawesi Selatan, dan organisasi/komunitas masyarakat setempat (Syahidallah, 2023). Keterlibatan tersebut impelementasi program hingga saat ini belum menemukan titik terang dan masih adanya tuntutan dan dampak yang dialami dari masyarakat setempat terkait lokasi pembangunan proyek. Maka dari itu, dapat dilihat dari proses program ini terjadi tarik menarik kepentingan oleh aktor kebijakan dalam membuat suatu kesepakatan sehingga program pengolahan sampah energi listrik di kota Makassar ini berlarut-larut, sehingga sangat penting untuk melihat relasi aktor kebijakan dalam program pengolahan sampah energi listrik di kota Makassar.

Agar berjalan dengan efektif dan berkelanjutan demi terciptanya kualitas lingkungan yang baik tentunya memerlukan sinergitas antar aktor yang terlibat, namun pada realita yang terjadi hingga saat ini adanya pertentangan dari masyarakat dalam proses realisasi program¹. Maka dari itu, aktor kebijakan yang terlibat yakni aktor negara mencakup pemimpin individual maupun organisasi birokrasi yang bertindak atas nama negara dan aktor non-negara ialah organisasi yang berada diluar birokrasi tanpa disertai campur tangan dari pemerintah (Goldstein, 2005). Pada penelitian ini aktor non-negara yang dimaksud adalah *private* (aktor yang terdiri dari industri swasta) dan *civil society* (masyarakat yang berperan sebagai penjaga perdamaian dan arbitrator antar kepentingan-kepentingan).

Dalam konteks penelitian ini, politik tata kelola mengacu pada dinamika kebijakan dari relasi aktor yang terbangun, partisipasi masyarakat, opini publik, dukungan politik, dan interaksi antara pemangku kepentingan dalam konteks pengolahan sampah berbasis energi listrik. Dalam proses perencanaan pembangunan, aspek transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan mendapatkan kesempatan untuk ikut merumuskan kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi informal dapat diberikan ruang dalam menentukan arah pembangunan sehingga mereka merasakan dan ikut bertanggungjawab terhadap keberhasilan pembangunan. Berdasarkan ulasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Politik Tata Kelola Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar". Secara keseluruhan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait fenomena yang terjadi tentang politik tata kelola dalam program Pengolahan Sampah Energi Litrik (PSEL) di Kota Makassar dan diharapkan dapat berjalan dengan sukses dengan memberikan manfaat yang signifikan bagi Kota Makassar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, bahwa permasalahan sampah di kota Makassar cukup kompleks terlebih lagi adanya inovasi baru program pengolahan sampah energi listrik (PSEL) yang menjadi proyek strategis nasional (PSN) sehingga

.

¹ (Syahidallah)

memicu berbagai dinamika dalam implementasinya. Maka penulis memfokuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

- Bagaimana interaksi aktor kebijakan dalam merumuskan dan mendorong Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar?
- 2. Apa potensi dampak yang diperoleh dari para aktor kebijakan terhadap program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1.Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Sehingga berdasarkan rumusan permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- Menjabarkan permasalahan dan urgensi yang timbul dalam Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di kota Makassar sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
- 2. Dapat melihat potensi dampak yang diperoleh aktor kebijakan terhadap implementasi Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Pada segi praktis penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses menangani permasalahan lingkungan dalam pembuatan hingga penerapan kebijakan terkait suatu program yang bekerjasama dengan tender proyek, dalam kaitan steakholder-nya yaitu Pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar, organisasi/komunitas masyarakat, masyarakat yang berdampak pada serta program pengolahan sampah energi listrik (PSEL) di Kota Makassar sehingga dapat menjadi bahan evaluasi, pertimbangan, dan acuan dalam melakukan pengambilan keputusan, kebijakan "sampah" di Kota Makassar sekaligus penanganan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Akademis

Pada segi Akademis penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan penelitian ilmu politik, khususnya kajian tentang politik tata kelola yang berfokus pada fenomena sosial-politik khususnya interaksi aktor kebijakan publik dalam perumusan proyek strategis nasional. kemudian memberikan sumbangan akademis dengan mendorong penelitian lebih lanjut yang komprehensif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai pendekatan, konsep, serta teori yang digunakan oleh penulis yang berkaitan dengan politik tata kelola program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di kota Makassar yang selanjutnya dalam hal ini akan menjadi dasar kerangka berpikir dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian yang akan menjadi bahan referensi serta pembanding dalam penelitian ini. Kemudian bab ini akan menguraikan kerangka konsep yang terdiri dari Teori Advocacy Coalition Frameworks (ACF) dan konsep pengolahan sampah energi listrik (PSEL) di kota Makassar yang menjadi acuan penulis untuk mencapai tujuan penelitian.

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk mencari sumber referensi yang akan dijadikan bahan pembanding untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu menunjukkan orinsinalitas penelitian yang dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas fenomena serupa seperti penelitian ini, diantaranya:

- 1. Gerakan Lingkungan Masyarakat Terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Gedebage pada tahun 2022 oleh Auliana Ghaisani dari Universitas Padiadiaran (Ghaisani, 2022: 157-166). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat polemik antara pemangku kebijakan yakni Pemerintah Kota Jawa Barat dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa tidak adanya sistem yang berjalan dengan baik, sehingga terjadi maladministrasi dalam pembangunan PLTSa Gedebage. Maka dari itu masyarakat Gedebage melakukan suatu gerakan sosial agar pemerintah lebih memperhatikan ialannva roda pemerintahan berdasarkan demokrasi partisipatif.
- Institusionalisasi Gerakan Lingkungan Dalam Menentang Rencana PLTSa Di Kota Bandung pada tahun 2015 oleh Wahyu Gunawan, Rd. A. Tachya Muhammad, dan Ari Ganjar dari

Universitas Padjadjaran (Gunawan et al., 2015: 67). Penelitian menunjukkan bahwa setelah bergabung dengan LPTT-BGC dan Walhi Jabar, aktivis mengubah pendekatan gerakan ke arah realis dari *shallow ecology*. Meskipun institusionalisasi membawa metode persuasif, aktivis memperkuat perlawanan terorganisasi terhadap PLTSa. Melalui LPTT-BGC, gerakan fokus pada pendidikan dan kerjasama dengan pemerintah dan swasta, sementara melalui Walhi Jabar, aktivis memanfaatkan jejaring, media massa, dan partisipasi massal.

3. Agenda Setting Pemerintah DKI Jakarta dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah TPST Bantar Gerbang pada tahun 2018 oleh Reynaldo Gabriel, Bandiyah, Piers Andreas Noak dari Universitas Udayana (Gabriel et al., 2020: 1-12). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pertumbuhan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah cenderung mengambil keputusan kebijakan konvensional tanpa memperhatikan solusi yang lebih inovatif, seperti teknologi incinerator yang diusulkan oleh Badan Pengkajian dan Teknologi (BPPT). Namun, usulan Penerapan menimbulkan kontroversi karena dipandang tidak ramah lingkungan oleh sebagian masyarakat dan LSM. Gubernur DKI Jakarta berupaya memperbaiki situasi dengan mengajukan revisi peraturan terkait pengelolaan sampah dan mencari solusi melalui Treatment Facility Intermediate (ITF) untuk mengatasi permasalahan sampah yang semakin meningkat.

Penelitian diatas memiliki relevansi yang terkait dengan penelitian ini, yaitu melihat bagaimana dinamika kebijakan terhadap implementasi program pengolahan sampah berbasis energi listrik dalam mewujudkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Yang menjadi pembeda, pada penelitian ini berfokus pada relasi aktor kebijakan dalam merumuskan dan mendorong program pengolahan sampah berbasis energi listrik di kota Makassar dan situasi kondisi politik tata kelola di kota Makassar yang berbeda dari penelitian terdahulu. Selain itu, teori yang digunakan berbeda sehingga pada hasil penelitian ini memperoleh hasil yang beda dari penelitian terdahulu. Pada penelitian ini para aktor membuka ruang untuk saling berinteraksi dan

membentuk koalisi pro dan kontra yang kemudian masing-masing dari koalisi yang terbentuk memiliki potensi dampak terhadap program Pengolahan Sampah Berbasis Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar.

2.2. Interaksi antar Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya (Budiardjo, 2007: 20). Kebijakan merupakan bagian dari keputusan politik, yang dimana ciri khas politik ialah keputusan yang keluar dari proses politik bersifat mengikat (otoritatif), dan dimaksudkan untuk kebaikan bersama masyarakat umum. Dengan demikian, keputusan politik ialah keputusan yang mengikat, menyangkut atau memengaruhi masyarakat umum, biasanya diurus dan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah (Rohaniah dan Efriza, 2017). Dengan demikian bahwa keputusan politik dapat pula dipahami sebagai pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah.

Salah satu instrumen utama yang menjadi alternatif pemerintah dalam menangani suatu permasalahan masyarakat dan isu-isu yang menjadi perhatian publik ialah kebijakan publik. Menurut Anderson (dalam Hill dan Hupe, 2002) memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kebijakan berkaitan dengan tindakan. Sedangkan menurut Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dinginkan (Handoyo, 2012).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, bahwa kebijakan ini berarti suatu tindakan yang dipilih dari beberapa alternatif oleh aktor-aktor tertentu dalam menanggapi permasalahan tertentu. Kebijakan dirumuskan oleh aktor-aktor tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dan terdiri dari serangkaian tindakan tertentu yang harus diambil dalam proses tertentu. Dalam proses kebijakan ini mencakup proses

yang rumit dan kompleks, mulai dari formulasi, implementasi, hingga evaluasi. Maka dari itu keterlibatan aktor-aktor dalam proses kebijakan ini sangat penting dan berpengaruh untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Interaksi yang terbangun dalam menjalin relasi antar aktor membuat rancangan kebijakan publik masing-masing memiliki representatif yang berbeda dan melibatkan banyak kepentingan.

Dalam prakteknya, kebijakan publik dirumuskan melalui interaksi antar aktor yang memiliki kepentingan berbeda dan menghadirkan sebuah kebijakan tidaklah mudah terlebih lagi yang dapat memuaskan seluruh aktor kebijakan dan kelompok kepentingan yang ada dalam lapisan masyarakat (Tamrin, 2017: 141-158). Hal ini dikarenakan beragamnya aspirasi dan tuntutan yang harus diakomodir dalam kebijakan. Penelitian ini melihat bagaimana interaksi antar aktor tersebut terjadi dalam perumusan rancangan kebijakan, dengan asumsi bahwa pembuatan kebijakan tidak dapat dipahami secara instan tanpa memahami proses interaksi, menyikapi hal tersebut dalam kajian kebijakan publik dikenal berbagai pendekatan dalam pemecahan suatu masalah, salah satu pendekatannya yakni Advocacy Coalition Framework (ACF).

Advocacy Coalition Framework (ACF) atau kerangka koalisi advokasi yang dikembangkan oleh Paul A. Sabatier pada akhir tahun 1980-an, ACF sebagai model analisis mengenai proses kerja pembuatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan publik yang melibatkan banyak kepentingan dan berbagai aktor didalamnya. Model ini dirancang untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dibuat dan diubah dalam situasi yang kompleks dengan banyak pihak yang terlibat, seperti pemerintah, kelompok kepentingan, dan pihak swasta. Advocacy Coalition Framework (ACF) sebagai salah satu kerangka yang berguna untuk membantu menganalisis kebijakan publik dengan melihat bagaimana berbagai pihak dengan kepentingan berbeda saling tarik menarik dalam proses pembuatan kebijakan(C. M. W. P. A. Sabatier, 2007: 123-136).

Advocacy Coalition Framework (ACF) telah menjadi salah satu pendekatan paling populer untuk membuat konsep dan memahami proses kebijakan (Heinmiller, 2023: 28-46). Dari banyaknya kepentingan sehingga ACF dapat menjelaskan bagaimana keyakinan dan tujuan aktor-aktor tersebut mempengaruhi kebijakan dan

memahami karakteristik penting dari pendekatan "*top-down*" dan "*bottom-up*" yang memperlihatkan interaksi berbagai aktor-aktor yang berkoalisi (Sabatier and Jenkins Smith 1988, 1993, 1999)(C. M. W. P. A. Sabatier, 2007: 123-136).

Advocacy Coaliton Framework (ACF) mengasumsikan bahwa perumusan kebijakan dalam masyarakat modern sangat kompleks baik itu dilihat secara subtansif maupun legal, sehingga para aktor harus memiliki spesialisasi jika ingin memiliki pengaruh. Spesialisasi tersebut terjadi dalam sub-sistem kebijakan yang terdiri dari para aktor yang secara teratur untuk saling mempengaruhi dalam sub-sistem kebijakan (Andi Aisyah Mujahida Ahmad, 2023: 16). ACF digambarkan sebagai sebuah struktur pembuatan kebijakan yang terdiri atas beberapa komponen seperti parameter yang relatif stabil, sub-sistem kebijakan (proses terjadinya pembuatan kebijakan), dan peristiwa-peristiwa eksternal diluar sistem. Sub-sistem kebijakan terbagi beberapa komponen diantaranya sistem keyakinan (belief-system), koalisi advokasi (advocacy coalition), perantara kebijakan (policy broker), sumber daya, venues, dan mekanisme perubahan kebijakan (Weible, 2007: 189-220).

Sub-sistem menjadi ruang bagi para aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan saling berinteraksi sehingga tidak ada satu pihak yang mendominasi. Dipahami sebagai suatu konsep perubahan kebijakan dalam sub-sistem yang dilakukan oleh aktor atau stakeholder yang terlibat dalam kebijakan tersebut yang memiliki keyakinan yang sama dan membentuk koalisi (Paul A. Sabatier, 1988: 129-68). Menurut Parsons (2003) subsistem kebijakan terdiri dari semua pihak yang memainkan bagian dalam penciptaan, diseminasi, dan evaluasi ide kebijakan.

Paul A. Sabatier dan Hank C. Jenkins-Smith menyebut bahwa proses pembuatan kebijakan sebagai sub-sistem yang dimana terjadinya interaksi antar aktor dari berbagai institusi berusaha untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dalam kebijakan tertentu (Paul A. Sabatier dan Hank C. Jenkins-Smith, 1999: 120). Sub-sistem kebijakan ini menjadi ruang bagi persaingan antar koalisi aktor, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ialah ranah politik yang penuh dengan pengaruh dan tekanan antar pihak. Proses perumusan kebijakan yang berlarut-larut dan membentuk pola konfigurasi koalisi antar aktor, para aktor memiliki kepentingan masing-masing atau organisasi melalui

koalisi, berfokus dan memperjuangkan kepentingannya dengan memastikan bahwa masalah yang ditangani dapat mencapai tujuan.

Dalam teori *Advocacy Coaliton Framework* (ACF) salah satu komponen menarik dari sub-sistem kebijakan adalah sistem keyakinan (*belief system*). Kebijakan publik sangatlah penting untuk memiliki sistem nilai dan keyakinan, hal tersebut menjadi dasar bagi strategi para aktor kebijakan dalam memengaruhi keputusan. Sistem keyakinan (*belief system*) dapat dikatakan juga sebagai ideologi, sebab setiap koalisi memiliki nilai (*value*) mendasar yang berpengaruh terhadap cara pandang dan pola pikir hingga pengambilan keputusan (Paul A. Sabatier dan Hank C. Jenkins-Smith, 1999: 120).

Advocacy Coaliton Framework (ACF) membedakan hirarki sistem nilai dan kepercayaan dalam tiga tingkatan yaitu pertama keyakinan inti (deep core beliefs) sebagai asumsi fundamental atau pandangan tentang dunia (worldviews). Kedua keyaninan terhadap inti kebijakan (policy core beliefs) sebagai strategi aktor dan posisinya dalam subsistem kebijakan, ini menunjukkan komitmen-komitmen dasar normatif yang dijadikan perekat antar semua pihak untuk masuk dalam permasalahan kebijakan. Dan ketiga keyakinan (secondary aspects) sebagai instrumen kebijakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan policy core, pada keyakinan ini seringkali terjadi perubahan kebijakan (Paul Cairney dan Paul A. Sabatier, 2016): 142).

Belief system sangat penting dalam pembentukan kebijakan yang menjadi dasar bagi koalisi advokasi untuk mempertahankan kepentingan dan berupaya mempengaruhi kebijakan (Catur Wulandari et. al, 2019: 1–8). Interaksi aktor terhadap kebijakan pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan agar nilai dan kepentingan-kepentingan ini bertemu dengan kepentingan politik yang dimiliki aktor lain. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Advocation Coalition Framework untuk melihat interaksi antar aktor dan sistem nilai pada koalisi kebijakan terhadap formulasi kebijakan.

Program pengolahan sampah energi listrik (PSEL) di Makassar dalam implementasinya sangat lambat dibandingkan 12 kota prioritas yang terpilih sebagai proyek strategis nasional, dari keterlambatan itu perlunya untuk melihat interaksi pada antar aktor kebijakan yang terlibat. Pada nyatanya dalam implementasi suatu program tentu pemerintah sebagai pelaksana tidak menjalankannya sendiri, maka

diperlukan aktor-aktor lain yang dilibatkan yakni private dan civil society. Hal tersebut berupaya untuk memiliki persamaan pandangan dan tindakan yang dilakukan terhadap program pengolahan sampah energi listrik (PSEL) di kota Makassar, dengan penggunaan teori advocacy coalition framework (ACF) penelitian ini melihat proses kebijakan sebagai interaksi antar koalisi aktor. Koalisi ini bergerak berdasarkan sistem kepercayaan mereka, mengadvokasi definisi mereka tentang masalah kebijakan dan implementasi dari solusi yang mereka tawarkan (Catur Wulandari et. al. 2019: 2). Interaksi antar aktor meliputi pemerintah sebagai pelaksana/regulator, swasta dan pengawas mendukung kebijakan untuk pembangunan, masyarakat berperan dalam bentuk partisipasi (Anggalih Kamimer, et. al. 2019; 81–98).

Interaksi antar aktor dalam formulasi kebijakan sangat penting dalam menentukan sebuah kebijakan, baik itu aktor formal sebagai pembuat kebijakan maupun aktor non-formal yakni ikut serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Sebagaimana tahapan formulasi kebijakan ini arena bagi pertukaran sumber daya antar aktor yang terlibat didalamnya untuk mengartikulasikan kepentingan masing-masing (Budi Winarno, 2014: 93). Dengan memakai model analisa Sabartier dan Jenkins Smith, maka suatu kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari berbagai interaksi dari aktor-aktor yang membentuk koalisi berdasarkan kesamaan kepentingan dan cara pandang terhadap kebijakan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, proses ini tidak hanya menjadi domain aktor pemerintah semata namun juga melibatkan banyak aktor di luar institusi pemerintah.

Kacamata ACF yang digunakan dalam formulasi kebijakan terhadap program pengolahan sampah energi listrik (PSEL) di kota Makassar untuk melihat adanya sumber daya utama untuk koalisi yakni aktor formal dalam posisi sebagai anggota koalisi advokasi didalamnya pejabat, legislator, dan penegak hukum, kemudian aktor non-formal yakni aktor masyarakat (*civil society*) yang ikut berpartisipasi dalam pemberian informasi melalui keterlibatan dan pengawasannya terhadap kinerja pemerintah kota Makassar, selain itu adapun aktor swasta yang terlibat sebagai tender proyek program pengolahan sampah energi listrik (PSEL) di kota Makassar pemilik industri yang mengolah sampah sekaligus investor dapat melihat hal apa saja yang berdampak pada industrinya dan keterkaitannya

dengan pembangunan PSEL di kota Makassar sehingga menjadi aktor yang tepat dalam formulasi kebijakan ini.

Pengambilan keputusan dalam teori ACF ini berdasarkan interaksi dan kompetisi antara koalisi-koalisi tersebut, adanya potensi ketidakcocokan kebijakan antar koalisi seringkali mencapai tingkat konflik politik (M. H. Tamrin, 2019: 141-158). Untuk itu, strategi utama koalisi dalam program pengolahan sampah energi listrik (PSEL) di kota Makassar adalah melibatkan aktor dengan berbagai kepentingan, baik yang mendukung maupun yang menentang. Hal ini bertujuan untuk melihat ruang-ruang politik dalam kebijakan dan menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan semua aktor.

2.3. Konsep Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar

Beberapa negara, terutama di Eropa dan Asia, seperti Republik Rakyat China (RRC) dan Singapura, sudah lama menggunakan sampah kota untuk menghasilkan energi listrik. Beberapa negara Barat seperti Denmark, Jerman, Swiss, Amerika Serikat, dan Prancis telah memaksimalkan pengolahan sampah untuk menghasilkan energi listrik. Proses ini tidak hanya mengatasi polusi, bau, dan pembuangannya, tetapi juga telah mengurangi dampak negatifnya. Swedia telah melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun dalam pengelolaan sampah, sebagaimana Swedia selalu menekankan bahwa sampah adalah salah satu sumber energi. Fokus utama dalam pengelolaan sampah adalah mengurangi jumlah sampah dan menggunakan sampah sebagai sumber energi. Penanganan sampah yang efektif juga didukung oleh tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah lama mendorong pemanfaatan energi yang berasal dari sampah untuk menyelesaikan masalah sampah di kota-kota yang mengalami darurat sampah dengan menggunakan jenis teknologi yang ramah lingkungan. Sejak tahun 2019 lalu, pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memproyeksikan pembangunan pengolahan sampah energi listrik (PSEL) di 12 kota di Indonesia yang terpilih sebagai kota darurat sampah, proyek PSEL ini termasuk dalam program Prioritas Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi

pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Program tersebut dicanangkan guna menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan sampah di Indonesia (Rosmini Anggraini dan Yayuk Uni W. Sagena, 2020: 43–61).

Proyek PSEL merupakan program yang telah digagas pemerintah untuk memanfaatkan energi yang bersih, alternatif serta terbarukan, dan salah satu bentuk komitmen Indonesia yang telah menyepakati global methane pledge untuk mengurangi emisi gas metana hingga 30% pada tahun 2030. Selain itu, program ini untuk mengejar target Net Zero Emission pada tahun 2060. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap, ada inisiatif dari seluruh pemerintah daerah untuk menuntaskan proyek PSEL. Program ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintah daerah maupun kota, terutama dari sisi kesehatan masyarakat terhadap sampah serta keindahan tata kota (Rosmini Anggraini dan Yayuk Uni W. Sagena, 2020: 43–61).

Pengolahan sampah berbasis energi listrik menggunakan yang dimana teknologi secara biologis dan tidak menggunakan mekanisme pembakaran. Sampah organik yang ditimbun akan mengalami proses dekomposisi secara anaerobik sehingga menghasilkan gas yang disebut dengan gas *landfill*. Gas tersebut mengandung berbagai jenis senyawa seperti karbon dioksida dan gas metana. Gas *landfill* yang terkumpul dari proses fermentasi anaerobik bahan organik tersebut akan menyebabkan meningkatnya suhu di sekitar TPA, menimbulkan bau tidak sedap, bahkan dapat memicu terjadinya ledakan. Namun, apabila gas metana yang terkandung pada gas *landfill* dikelola dengan baik, maka dapat memberikan berbagai keuntungan seperti mengurangi efek rumah kaca dan kerusakan lingkungan bahkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar sampah menjadi energi listrik (Kuncoro, 2008).

Di samping itu, PSEL juga menawarkan dua keuntungan. Pertama, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kedua, mengolah limbah dengan memanfaatkannya sebagai sumber daya energi terbarukan. Teknologi PSEL menggunakan pendekatan *zero waste* sehingga sampahnya hilang setelah diubah menjadi biomassa. Teknologi tersebut sudah diterapkan di banyak negara maju yang memenuhi standar emisi ramah lingkungan dan beroperasi di perkotaan. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden untuk

memaksimalkan semua potensi sumber energi yang ada di dalam negeri, agar turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi memperkuat ketahanan energi (Rosmini Anggraini dan Yayuk Uni W. Sagena, 2020: 43-61).

Dalam konteks penelitian ini, beberapa tahapan dalam konsep pengolahan sampah energi listrik yang akan direalisasikan kota Makassar diantaranya yakni perencanaan meliputi penyusunan studi kelayakan yang dimana bertujuan untuk mengkaji kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan dari proyek pengolahan sampah energi listrik. Kemudian penyusunan dokumen perencanaan teknis yang berisi gambaran umum proyek termasuk lokasi, luas lahan, kapasitas pengolahan, dan teknologi yang digunakan. Dan perencanaan terakhir yakni penyusunan dokumen peaksanaan pengadaan yang berisi rencana pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk pembangunan proyek. Dalam tahapan perencanaan ini meliputi juga tahapan proses tender yang dimulai dari Prakualifikasi, Penawaran Dokumen Teknis dan Kelayakan Finansial, Dialog Optimalisasi, Evaluasi Dokumen Penawaran, Beauty Contest dan Klarifikasi Lahan, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan dibantu oleh Tim Ahli PSEL KSPI. Dalam penentuan tender ini ada lima kriteria penilaian, yaitu pengelolaan lingkungan, pemilihan teknologi. sosial kemasyarakatan, lahan dan regulasi, serta kelayakan finansial (Syahidallah, 2023).

Tahapan yang kedua yaitu pembangunan meliputi pengadaan lahan yang dilakukan melalui mekanisme lelang (tender) atau pengadaan langsung, setelah itu pembangunan infrastruktur meliputi akses jalan, jaringan listrik, dan bangunan pengolahan sampah, serta tahap terakhir yakni instalasi peralatan yang dilakukan oleh pemenang tender terpilih dari pemerintah. Saat ini proses realisasi program pengolahan sampah energi listrik di kota Makassar memasuki pada tahapan masa sanggah pemenang tender melalui mekanisme KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur) kemudian diumumkan oleh panitia lelang berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 3361/188.4.45/TAHUN 2023 Tentang Penetapan Pemenang Tender Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Kota Makassar, yang terdiri dari Konsorsium Pemenang yakni SUS Indonesia Holding Limited, Shanghai SUS Environment Co., Ltd., dan PT Grand Puri Indonesia kemudian Pemenang

Cadangan 1 yakni PT Tian Ying Indonesia, PT. China Communication Construction Engineering Indonesia, dan PT. Kenanga Jaya. Dan Pemenang Cadangan 2 yakni Hangzhou Jinjiang Environment Co., Ltd dan PT. Cahaya Satria Energi ("Pengumuman Pemenang Tender PSEL Kota Makassar"). Pemenang tender tersebut tentunya wajib memenuhi lima kriteria yakni pengelolaan lingkungan, pemilihan teknologi, sosial kemasyarakatan, lahan dan regulasi, dan kelayakan finansial untuk pembangunan PSEL. Dengan diumumkannya pemenang lelang ini maka proses realisasi program pengolahan sampah energi listrik di kota Makassar akan menuju tahap *Ground Breaking* (Siti Aminah, 2024).

Tahapan yang ketiga yakni tahap pengoperasian meliputi pesiapan operasi seperti pelatihan petugas, uji coba peralatan, dan sosialisasi kepada masyarakat, setelah itu operasi komersial yang dimulai setelah peralatan dinyatakan layak operasi oleh pihak berwenang, dan tahapan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala untuk menjaga keandalan peralatan. Tahapan yang terakhir yakni manajemen yang meliputi pengelolaan sampah seperti pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Kemudian pengelolaan limbah meliputi pengolahan limbah cair dan limbah gas. Setelah itu pengelolaan lingkungan. Meliputi monitoring dan evaluasi dampak lingkungan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan dalam menindaklanjuti Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memastikan keberhasilan program pengolahan sampah energi listrik (PSEL) di Kota Makassar.

2.4. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berfikir yang membuahkan kesimpulan, jadi kerangka berfikir disusun dari berbagai teori yang dideskripsikan (Sugiyono, 2017: 60).

Dalam penelitian ini berfokus pada masalah sampah menjadi isu lingkungan yang serius dan interaksi antar aktor yang kompleks, untuk menindaklanjuti hal ini pemerintah melalui peraturan presiden nomor 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah

Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Melalui adanya pengelolaan sampah berbasis energi listrik akan menurunkan kuantitas volume sampah yang berfokus pada 12 kota di Indonesia darurat sampah dan termasuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kota Makassar sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam realisasi program pengolahan sampah energi listrik (PSEL) agar berjalan dengan efektif dan berkelanjutan demi terciptanya kualitas lingkungan yang baik tentunya memerlukan sinergitas antar aktor yang terlibat, namun pada realita yang terjadi hingga saat ini adanya pertentangan dari masyarakat dalam proses realisasi program (Syahidallah, 2023). Maka dari itu, aktor kebijakan yang terlibat yakni aktor negara mencakup pemimpin individual maupun organisasi birokrasi yang bertindak atas nama negara dan aktor non-negara ialah organisasi yang berada diluar birokrasi tanpa disertai campur tangan dari pemerintah (Goldstein, 2005). Pada penelitian ini aktor non-negara yang dimaksud adalah *private* (aktor yang terdiri dari industri swasta) dan *civil society* (masyarakat yang berperan sebagai penjaga perdamaian dan arbitrator antar kepentingan-kepentingan).

Dalam penelitian ini menggunakan teori Paul A. Sabatier dengan melihat interaksi antar aktor negara dan non-negara dalam proses formulasi kebijakan publik yang melibatkan tiga elemen utama yakni aktor negara, industri swasta (*private*), dan *civil society*. Interaksi yang dari aktor yang terlibat mengambil peran yang sangat penting sebab mereka mengartikulasikan masing-masing kepentingan dalam proses formulasi kebijakan, teori ACF ini berfokus pada keyakinan bersama antar aktor yang berpengaruh terhadap formulasi kebijakan dan informasi yang efektif kemudian dipetimbangkan untuk diambil keputusan (Paul Cairney, 2012: 221).

Membuat sebuah kebijakan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Dan kepentingan politik akan menerima, menolak, atau memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya (Anggalih B.M Kamim, et al., 2019: 89). Maka dari itu, interaksi aktor kebijakan yang terjadi diantara ketiga elemen tersebut membentuk dua koalisi yaitu koalisi yang mendukung (pro) terhadap program pengolahan sampah energi listrik (PSEL) di kota Makassar dan koalisi yang menentang (kontra) adanya program pengolahan sampah energi listrik (PSEL) di kota

Makassar. Perbedaan tersebut menimbulkan adanya *belief system* dalam hubungan para aktor. Keyakinan dalam relasi para aktor dapat memperlambat penetapan suatu kebijakan yang berlarut-larut. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada kebijakan publik yang bertujuan untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat dengan menggunakan teori *advocacy coalition framework* (ACF) sebagai kerangka pikir yang komprehensif tentang keterlibatan politik sekaligus potensi dampak yang dihasilkan dari pembentukan koalisi dalam program pengolahan sampah energi listrik (PSEL) di Kota Makasar.